

PERAN BIROKRASI LOKAL DALAM SKEMA PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA AIR

Hanantyo Sri Nugroho

Abstract

Bureaucratic capacity in controlling the public-private partnership scheme is inadequate, so that the scheme does not protect the public interest. This paper uses the perspective of institutional approach to the market based government to help explain menggejalanya unpreparedness of government bureaucracy when it should be involved in the scheme of privatization policy in the management of shared water resources. This perspective requires the organizers to run the country together with a logic state power market participants. It is important to note that, in her involvement in politics and the logic of the market running, simultaneously also ongoing political interaction. Therefore, bureaucracy as the parties involved in the privatization scheme is important to analyze the attitude, position and political struggles.

Keyword: Role of the local bureaucracy, management of shared water resources

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini hendak memberikan gambaran kapasitas birokrasi yang diharapkan memiliki kendali dibalik skema kerjasama pemerintah-swasta dalam pengelolaan bersama sumber daya air. Permasalahan ini menarik untuk dikaji karena keresahan terhadap proses liberalisasi, tepatnya marginalisasi peran birokrasi pemerintah, yang sepertinya tidak disadari. Sangatlah ironis jika kita ingat bahwa, pemerintah mengesankan dirinya sebagai penentu nasib publik dan selalu menjadi harapan dalam mencari solusi. Kajian akan dibatasi pada privatisasi sumberdaya air.

Kapasitas birokrasi memiliki peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Kapasitas birokrasi dalam pembangunan berasal dari kekuasaan dan struktur hirarki yang dimilikinya. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi kontrol, stabilitas, dan pengatur pembangunan. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan adanya dominasi birokrasi sebagai lembaga yang memiliki kapasitas dalam pembangunan. Artinya, birokrasi menjadi aktor yang memiliki kapasitas dalam melakukan proses pembangunan demi kebaikan masyarakat. Dengan demikian, peran tersebut merupakan peran yang ditanggung dan dijalankan oleh birokrasi.

Lebih lanjut, diperlukan kapasitas birokrasi yang bersifat responsif, imajinatif,

dan inovatif dalam mengembangkan dan memiliki kendali atas sumber daya alam yang dimiliki. Artinya, birokrasi bekerja melalui cara-cara partisipatif, memfasilitasi sumber daya lokal, dan mengembangkan sistem yang memiliki akuntabilitas dan demokratis. Kemampuan birokrasi tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kualitas birokrasi, yakni cepat merespon permasalahan dan mengambil keputusan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan dan meningkatkan daya saing birokrasi. Dengan demikian, dengan kemampuan birokrasi tersebut diharapkan birokrasi memiliki kapasitas yang memadai dalam mengendalikan skema kerjasama pemerintah-swasta tersebut sehingga skema kerjasama pemerintah-swasta yang sedang berlangsung dapat melindungi kepentingan publik.

Namun, birokrasi tidak mengantisipasi dan tidak memberikan perlawanan terhadap dampak logis dari liberalisasi yang sedang berlangsung melalui skema kerjasama pemerintah-swasta. Ketidaksiapan birokrasi tersebut yang menyebabkan birokrasi menelan mentah-mentah gagasan tentang peran negara yang terpinggirkan dalam liberalisasi. Hal tersebut yang menyebabkan terjaganya keberlangsungan liberalisasi hampir tanpa kendala. Tentunya, peran negara yang terpinggirkan

memperlihatkan bahwa lemahnya birokrasi dalam memberikan perlawanan terhadap keberlangsungan liberalisasi. Selain ketidaksiapan dan lemahnya birokrasi, liberalisasi juga merubah birokrasi dalam memaknai publik terkait dengan kepentingan publik.

Kebijakan pemerintah dituntut sesuai dengan logika pasar. Pasar menjadi elemen kunci dalam membentuk pola pikir dan juga pertimbangan peran negara dalam pelayanan publik. Pelayanan publik tidak menempatkan kepentingan pemerintahan dan penyedia layanan publik sebagai dasar. Bagaimana kemudian, kebijakan publik diserahkan kepada mekanisme pasar untuk bekerja. Mekanisme pasar dianggap dapat menciptakan efisiensi. Padahal penguasaan sumber daya oleh pihak swasta tersebut bertentangan terhadap penguasaan sumber daya yang sepenuhnya dikuasai oleh negara. Artinya, terjadi perubahan pendulum yang bergerak dari pengelolaan yang dikuasai oleh negara menuju kearah kekuatan pemilik modal yang juga memunculkan upaya pendefinisian ulang terhadap *public goods* dan *private goods*. Kondisi bahwa melalui dasar efisiensi kebijakan publik inilah yang kemudian digunakan untuk membuka pemodal besar dalam transformasi kekuatan modal sebagai penyedia layanan publik.

Tercecernya telaah peranan birokrasi ini adalah pertanda ketidaksiapan dalam melakukan liberalisasi. Hal tersebut membuat birokrasi di Indonesia perlu menyikapi secara cerdas agar tidak hanya diperalat oleh liberalisasi di era globalisasi ini. Tingginya harapan masyarakat terhadap birokrasi dalam persepsi bahwa birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kapasitas dalam melakukan proses pembangunan demi kebaikan

B. PEMBAHASAN

Fenomena perubahan kebijakan sumber daya air secara umum dengan kehadiran kebijakan struktur privatisasi atas aset publik menjadi tanda dalam percepatan globalisasi neoliberalisme. Perubahan kebijakan sumber daya air telah dimulai saat munculnya UU No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air sebagai

masyarakat, bukan memindahkan tanggung jawab kepada swasta, juga menjadi latarbelakang pendorong bagi birokrasi untuk memainkan perannya dalam liberalisasi tersebut. Namun, yang terjadi adalah kapasitas birokrasi dalam mengendalikan skema kerjasama pemerintah-swasta tidak memadai, sehingga skema tersebut tidak melindungi kepentingan publik. Oleh karena pengetahuan tentang respon birokrasi dalam kesiapan, kuat atau lemahnya, serta efektif atau tidak efektifnya birokrasi terhadap liberalisasi ini belum banyak dilakukan, maka kemudian menjadi menarik untuk dikaji bagaimana peranan birokrasi lokal dalam skema pengelolaan bersama sumber daya Air.

Kajian mengenai privatisasi sumber daya air juga pernah ada sebelumnya. Pertama, terdapat Skripsi yang ditulis oleh Erwin Endaryanta, yakni Politik Air di Indonesia: Penjarahan Sigedhang Oleh Korporasi Aqua Danone. Tulisan ini menganalisis bencana industrial dan resiko yang muncul dari proses privatisasi sumber air oleh industri pengelolaan sumber air tanah Si-Gedhang–Klaten, Jawa Tengah, yang menjadi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Aqua-Danone. Skripsi ini melihat pada pemetaan kuasa dan eksploitasi sumber air. Kedua, penulisan Tesis oleh Syaharuddin Idris mengenai kasus privatisasi pengelolaan air minum di PDAM Kota Makassar; dari investasi ke komodifikasi. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana skema kebijakan privatisasi dan rencana investasi di PDAM Kota Makassar berikut pengaruhnya terhadap terjadinya komodifikasi air di PDAM Kota Makassar. Dua konsep utama dalam tesis ini, yaitu investasi dan komodifikasi air.

fenomena privatisasi aset publik dalam bidang sumber daya air. Kondisi ini memicu suatu usaha penguatan pola korporasi swasta dalam penguasaan dan pengelolaan terhadap sumber daya air. Perubahan ini menggambarkan pendulum yang bergerak dari pengelolaan yang dikuasai oleh negara menuju kearah

kekuatan pemilik modal. Perubahan tersebut kemudian memunculkan upaya pendefinisian ulang terhadap *public goods* dan *private goods*. Endaryanta (2007:99) berpendapat bahwa dalam argumentasi proses kebijakan publik menunjukkan pola dan substansi hilangnya dimensi publik dalam dataran proses, keberpihakan, dan implementasinya. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah peran negara dalam menghadirkan ketiadaan *public goods*.

Pelayanan publik tidak menempatkan kepentingan pemerintahan dan penyedia layanan publik sebagai dasar, melainkan berdasarkan kepada kepentingan pengguna jasa pelayanan, dalam hal ini konsumen. Hal yang kemudian menjadikan masyarakat sebagai individu. Oleh karena itu, terjadi pergeseran dari "social citizenship" menjadi "market citizenship" (Jayasuriya, 2006:3). Individu dipandang sebagai kompensasi yang diakibatkan dari aktivitas pasar. Hal tersebut kemudian diseimbangkan melalui kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh negara. Kebijakan sosial bukan berdasarkan kepada hak yang melekat pada setiap individu, melainkan lebih kepada kebijakan yang spesifik dan terbatas. Kebijakan sosial mempunyai tujuan agar mendorong partisipasi individu dalam ekonomi pasar melalui kapasitas dan aset yang dimiliki oleh setiap individu (Jayasuriya, 2006). Artinya, negara menjadi pengobat bagi efek yang ditimbulkan oleh pasar agar kemudian individu mempunyai kapabilitas terhadap pasar.

Pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil kompetisi bebas dalam sebuah mekanisme bebas, yakni pasar. Kompetisi dianggap sebagai cara efisien dan efektif untuk mengalokasikan sumber daya. Harga barang dan jasa kemudian menjadi indikator ketersediaan sumber daya. Murahness harga suatu produk menunjukkan persediaan masih banyak. Sebaliknya dengan mahalness harga suatu produk menunjukkan persediaan mulai langka. Dengan tingginya harga membuat orang untuk menanam modal kesana, oleh karena harga menjadi tanda atas apa yang harus diproduksi. Dengan alasan tersebut, neoliberalisme beranggapan tidak perlunya

campur tangan pemerintah dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar untuk bekerja. Selain itu, pemerintah harus menghentikan subsidi kepada rakyat karena hal itu bertentangan dengan prinsip menjauhkan campur tangan pemerintah dan prinsip pasar bebas. Oleh karena itu, kesejahteraan bersama dianggap menghalangi pertumbuhan (Habibullah, 2009:26-32).

Tentunya, perubahan pendulum yang bergerak dari pengelolaan yang dikuasai oleh negara menuju kearah kekuatan pemilik modal memunculkan upaya pendefinisian ulang terhadap *public goods* dan *private goods*. Bagaimana kemudian kebijakan publik diserahkan kepada mekanisme pasar untuk bekerja. Mekanisme pasar dianggap dapat menciptakan efisiensi. Namun, publik sering dipakai sebagai istilah yang populer dan dipakai untuk justifikasi maupun memanipulasi bagi elit politik nasional dalam mencapai tujuannya sendiri (Endaryanta, 2007:91). Melalui dasar efisiensi kebijakan publik inilah kemudian digunakan untuk membuka pemodal besar dalam transformasi kekuatan modal sebagai penyedia layanan publik. Hal tersebut tentu saja memarjinalkan masyarakat dalam akses dan kapasitasnya dalam layanan publik tersebut. Dengan demikian, apa yang telah dikemukakan diatas diketahui bahwa bagaimana kemudian telah terjadi perubahan pendulum yang bergerak dari pengelolaan yang dikuasai oleh negara menuju kearah kekuatan pemilik modal dalam liberalisasi.

Lebih lanjut, pergeseran pengelolaan yang dikuasai oleh negara menuju kearah kekuatan pemilik modal diperlukan adanya kapasitas birokrasi. Oleh karena, pada dasarnya penguasaan sumber daya sepenuhnya dikuasai oleh negara. Hal tersebut dikarenakan negara merupakan penyelenggara, sedangkan keterlibatan pihak swasta berada pada penyelenggaraan. Oleh karena itu, diperlukannya kapasitas birokrasi yang memadai dalam mengendalikan skema kerjasama pemerintah-swasta sehingga diharapkan skema tersebut dapat melindungi kepentingan publik. Tentunya, kapasitas birokrasi memiliki peranan yang dominan dalam proses pembangunan

karena berasal dari kekuasaan dan struktur hirarki yang dimilikinya. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi kontrol, stabilitas, dan pengatur pembangunan. Artinya, birokrasi menjadi aktor yang memiliki kapasitas dalam melakukan proses pembangunan demi kebaikan masyarakat. Dengan demikian, peran tersebut merupakan peran yang ditanggung dan dijalankan oleh birokrasi dalam skema kerjasama pemerintah-swasta.

Namun demikian, kapasitas birokrasi melemah dan meminggirkan perannya sebagai dampak logis dari derasnya pewacanaan liberalisasi dalam skema kerjasama pemerintah-swasta. Oleh karena, yang terjadi adalah memindahkan tanggungjawab dari pemerintah kepada swasta. Hal tersebut tentu mengecilkan ekspektasi publik terhadap pemerintah agar memberikan solusi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam skema kerjasama pemerintah-swasta terhadap pengelolaan sumber daya.

Derasnya pewacanaan atas liberalisasi yang sangat antipati kepada gagasan negara kuat muncul ketika kepemimpinan Margaret Thatcher dan Ronald Reagan (Hertz, 2005:24); bagaimana mereka menolak Keynesianisme yang mengemukakan konsep negara intervensionis dalam mewujudkan *full employment*, melainkan lebih memilih pandangan Milton Friedman yang mengutarakan konsep bahwa negara tidak boleh mencampuri perekonomian dan menarik pajak dari rakyatnya karena telah terbukti bahwa krisis ekonomi semakin memburuk jika negara berusaha mengatasinya, dimana urusan negara hanyalah masalah tentara dan polisi, yang melindungi warga negaranya.

C. PENUTUP

Skema liberalisasi yang diwacanakan secara gencar namun tidak mengusung label liberalisasi telah berhasil "memaksa" pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih pro-pasar dan melemahkan kebijakan-kebijakan sosialnya, termasuk meminggirkan perannya sendiri. Peminggiran peran

Wacana ini secara diam-diam memberi isyarat bahwa negara yang baik, bukan hanya yang keterlibatan minimal dalam pengelolaan kepentingan publik, melainkan juga lemah dibandingkan dengan kekuatan swasta. Kalaulah kuat, kekuatannya didedikasikan untuk memfasilitasi swasta, dalam hal ini menjadi fasilitator. Hal tersebut bagi Marx dikarenakan, pertentangan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus hanyalah khayalan yang digunakan oleh para birokrat untuk membenarkan kepentingan khusus mereka sendiri (Albrow, 2005:82). Oleh karena itu, seringkali kapasitas birokrasi dalam mengendalikan skema kerjasama pemerintah-swasta tidak memadai, sehingga skema tersebut tidak melindungi kepentingan publik, karena adanya kepentingan dalam khusus skema kerjasama pemerintah-swasta. Di dalam birokrasi, identitas kepentingan negara dan identitas tujuan pribadi tertentu menjadi begitu kentara, sehingga kepentingan negara menjelma menjadi tujuan dari pribadi tertentu, yang bertentangan dengan tujuan pribadi yang lain (Albrow, 2005:82). Selanjutnya Marx menjelaskan (Albrow, 2005:83), bahwa walaupun negara telah menjadi suatu entitas yang terpisah, namun negara tidak lebih dari bentuk organisasi yang kaum borjuis perlu mengadopsinya demi terjaminnya hubungan timbal-balik antara pemilikan dan kepentingan mereka. Artinya, birokrasi tidak berdiri secara independen. Birokrasi menjadi pelayan atau pendukung dari struktur kelas tertentu. Hal tersebut menyebabkan bahwa kepentingan publik hanya sebagai justifikasi dari apa yang dilakukan oleh birokrasi. Dengan demikian, negara, dalam hal ini birokrasi, menikmati kendali dari swasta.

sentral pemerintah yang telah menghasilkan kemajuan ekonomi dalam beberapa dekade yang lalu seolah tidak relevan, karena seksamanya pewacanaan liberalisasi, dan efektivitas pewacanaan yang tidak mengedepankan atribut liberal. Yang terjadi bukan hanya gejala melemahnya kapasitas institusi pemerintah

untuk menegaskan kebijakan publiknya, melainkan juga ketidakcermatan pemerintah terhadap perpolitikan yang secara diam-diam berlangsung dibalik proses liberalisasi. Point yang perlu dikedepankan di sini bukan hanya negara menjadi rentan terhadap pengaruh aktor-aktor bisnis, namun kerentanan itu bersumber dari ketidakfahaman terhadap esensi liberalisasi itu sendiri.

Ide ekonomi pasar sangat bergantung pada institusi-institusi pasar yang efektif dan kapabilitas negara untuk menciptakan dan menegakkan aturan main serta sejumlah insentif yang mendorong pertumbuhan maka institusi pemerintah telah ditransformasikan dan sebagian digeser ke dalam arena-arena instusional diluar negara dan bekerja sesuai logika pasar. Di sisi lain, ada logika politik pemerintah yang khawatir terhadap kompetisi dan ketidakpastian yang dibawa oleh pasar. Disinilah terletak arti penting atau posisi strategis yang harus dimainkan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mengembangkan kapasitasnya untuk memonitor, memahami cara kerja, dan kalau perlu merekasaya bekerjanya pasar agar dampak negatif dari ekonomi pasar dapat diminimalisir. Prasyarat untuk itu adalah adanya kapasitas berfikir dan berfikir strategis, sedemikian sehingga tidak hanya, apalagi menjadi bulan-bulanan dari skema yang disebut *market-based governance*.

Selain menciptakan dan menegakkan aturan main serta sejumlah insentif, logika ini kemudian melahirkan dorongan bagi pemerintah untuk mengambil inisiatif yang akan memperkuat sistem perlindungan sosial. Artinya, kemampuan kapasitas birokrasi dan sistem menentukan keberhasilan dalam keteraturan keberlangsungan pasar. Hal yang kemudian menjadikan masyarakat sebagai individu. Individu dipandang sebagai kompensasi yang diakibatkan dari aktivitas pasar. Hal tersebut kemudian diseimbangkan melalui kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh negara. Kebijakan sosial bukan berdasarkan kepada hak yang melekat pada setiap individu, melainkan lebih kepada kebijakan yang spesifik dan terbatas. Artinya, negara menjadi pengobat bagi efek yang ditimbulkan oleh pasar agar

kemudian individu mempunyai kapabilitas terhadap pasar. Padahal, kapasitas birokrasi memiliki peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Kapasitas birokrasi dalam pembangunan berasal dari kekuasaan dan struktur hirarki yang dimilikinya. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi kontrol, stabilitas, dan pengatur pembangunan. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan adanya dominasi birokrasi sebagai lembaga yang memiliki kapasitas dalam pembangunan. Artinya, birokrasi menjadi aktor memiliki kapasitas dalam melakukan proses pembangunan demi kebaikan masyarakat. Namun, yang terjadi adalah ketidaksiapan birokrasi pemerintah dalam merespon dan mengelola liberalisasi melalui skema kerjasama pemerintah-swasta.

Selain kemampuan dari kapasitas birokrasi, skema kerjasama pemerintah-swasta tidak bisa terlepas dari pejabat-pejabat yang ada dalam birokrasi. Pejabat yang ada dalam birokrasi merupakan penentu dari keputusan yang ada pada birokrasi. Meskipun tidak bertanggung jawab kepada masyarakat secara langsung, namun keputusan yang dibuat oleh pejabat birokrasi tersebut mengikat masyarakat. Permasalahan yang timbul kemudian adalah permasalahan yang ditimbulkan akibat dari pejabat birokrasi yang gagal memahami dan menanggapi kebutuhan atas persoalan tertentu. Hal tersebut dapat terjadi walaupun terdapat fungsi kontrol, berdasarkan struktur hirakis, yang ada dalam birokrasi itu sendiri. Hal tersebut disebabkan adanya kekuasaan yang besar yang berasal dari jabatannya. Tentunya, besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat birokrasi kemudian membuat posisi pejabat birokrasi terdiferensiasi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pejabat birokrasi seringkali memiliki aliansi terhadap kepentingan golongan tertentu.

Ketidaksiapan birokrasi dan kapasitas pejabat birokrasi tersebut kemudian yang menyebabkan birokrasi menelan mentah-mentah gagasan tentang peran negara yang terpinggirkan dalam liberalisasi. Hal tersebut yang menyebabkan terjaganya keberlangsungan liberalisasi hampir tanpa kendala. Tentunya, peran negara yang terpinggirkan

memperlihatkan bahwa lemahnya birokrasi dalam memberikan perlawanan terhadap keberlangsungan liberalisasi.

Oleh karena itu, diperlukan cara-cara otoritatif yang dapat mengarahkan pejabat birokrasi tersebut. Cara-cara tersebut untuk mengarahkan dan mengontrol birokrasi maupun keberlangsungan skema kerjasama pemerintah-swasta. Meskipun begitu, batas-batas kontrol perlu dilakukan, sehingga tugas-tugas administrasi dapat ditegaskan dan aturan dapat ditegakkan sehingga kemudian dapat menciptakan dan meningkatkan daya saing birokrasi dalam skema kerjasama pemerintah-swasta. Peraturan diterapkan karena birokrasi memiliki tugas dalam menginterpretasikan dan menilai apakah kondisi-kondisi empiris yang terjadi membenarkan penerapannya dan

keberlangsungan dari skema kerjasama pemerintah-swasta.

Komitmen pejabat birokrasi terhadap nasionalisme bagi skema kerjasama pemerintah-swasta lebih penting ketimbang sistem kontrol. Komitmen serta pengawalan nasionalisme dalam kebijakan publik perlu dilakukan oleh birokrasi untuk menyikapi dan mengelola proses liberalisasi serta memunculkan peran birokrasi. Hal tersebut dapat menciptakan posisi tawar birokrasi dalam skema kerjasama pemerintah-swasta serta melawan derasnya pewacanaan dari liberalisasi berupa pentingnya meminggirkan peran birokrasi lewat skema kerjasama pemerintah-swasta tersebut. Artinya, melalui komitmen serta pengawalan nasionalisme, pejabat birokrasi dapat mengambil peran secara tidak langsung dalam skema kerjasama pemerintah-swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin. 2005. *Birokrasi*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Caporaso, James A. Dan David P. Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Endaryanta, Erwin. 2007. *Politik Air : Studi Politik Privatisasi Air dalam Relasi Ekonomi Politik Negara dan Trans National Corporations (TNC), Studi Kasus Pemetaan Kuasa dan Eksploitasi Sumber Air Si Gedhang Klaten oleh PT Aqua Danone*. UGM : Laboratorium Fisipol UGM.
- 2009. *Resiko Bencana Industrial dalam Privatisasi Sumber Air Si-Gedhang—Klaten*. Journal disaster, political and economic studies of disaster.
- Friedman, Milton dan Rose Friedman. 2013. *Free to Choose : A Personal Statement*. Yogyakarta : Pusstaka Pelajar.
- Habibullah, A. 2009. *Kebijakan Privatisasi BUMN : Relasi State, Market dan Civil Society*. Malang : Averroes Press.
- Idris, Syaharuddin. 2013. Kasus Privatisasi Pengelolaan Air Minum di PDAM Kota Makasar; dari investasi ke komodifikasi. TESIS. UGM.
- Jayasuriya, Kanishka. 2006. *Statecraft, Welfare, and The Politics of Inclusion*. New York : Palgrave Macmillan.
- Johnson, Craig. 2013. *Pembangunan Tanpa Teori : Kuasa Pengetahuan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta : Resist Book.
- Marsh, David & Gerry Stoker. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung : Nusa Media.
- Peters, B. Guy. 2001. *The Future of Governing*. Kansas : University Press of Kansas.
- Prasetyantoko, A dkk. 2012. *Pembangunan Inklusif : Prospek dan Tantangan*. Jakarta : LP3ES.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as freedom*. Oxford : Oxford University Press.
- Stone, Deborah A. 1997. *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*. New York: WW Norton.